

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Larangan Perekaman Dan Pengambilan Gambar Bermuatan Seksual Pada Pasal 14 (1) A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS Di Negara Indonesia Dan Negara Amerika)” ini ditulis oleh Cindy Agustina Finasti, NIM. 126103201058, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Fahmi Arif, S.H, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual yang termaktub pada pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perbandingannya dengan Undang-Undang Negara Amerika Serikat serta keempat negara bagiannya yang cukup spesifik dalam mengatur muatan yang dilarang dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang mengumpulkan data-data dari primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual yang termaktub pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kurang berfokus pada cakupan muatan yang dilarang sehingga dalam penerapannya menimbulkan celah multitafsir. Untuk itu, perlu adanya upaya pembaharuan dengan menyebutkan cakupan muatan yang dilarang pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut dapat diupayakan dengan melihat referensi pengaturan yang ada pada Negara lain seperti melalui perbandingan pengaturan larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada Undang-Undang Negara Amerika Serikat yang cenderung spesifik dalam menyebutkan dan menjelaskan perbuatan yang dilarang untuk direkam dan dipotret, cakupan muatan yang dilarang untuk direkam dan dipotret, tempat yang dilarang untuk adanya aktivitas perekaman dan pengambilan gambar serta kondisi tertentu seseorang yang dilarang sebagai objek perekaman dan pengambilan gambar tanpa persetujuan. Meskipun pada kedua Negara tersebut memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya dan agama, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pembaharuan pada pasal 14 ayat (1) a yang lebih spesifik mengenai muatan yang dilarang tanpa meniru muatan yang termaktub pada Undang-Undang Negara Amerika Serikat. Untuk itu, diharapkan Negara Indonesia mampu menciptakan aturan orisinil yang dapat menjangkau seluruh keberagaman dalam masyarakat dengan menyebutkan konteks bermuatan seksual dengan lebih spesifik seperti halnya berupa ketelanjangan dan bagian tubuh yang sewajarnya tertutupi pakaian serta aktivitas seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek yang direkam serta diambil gambarnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Muatan Seksual, Perbandingan Hukum

## ABSTRACT

*Thesis with the title "Judicial Analysis of the Prohibition of Recording and Taking Images of Sexual Content in Article 14 (1) A of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) (Comparative Study of TPKS Laws in Indonesia and America)" This was written by Cindy Agustina Finasti, NIM. 126103201058, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah University Tulungagung, Supervisor Fahmi Arif, S.H, M.H.*

*This research aims to find out how the regulations regarding the recording and taking of sexually charged images are regulated in Article 14 paragraph (1) letter a of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and the comparison with the Laws of the United States and its four states. which is quite specific in regulating prohibited content using a comparative approach and a statutory approach with documentation data collection techniques that collect data from primary, secondary and tertiary which is then analyzed using deductive logic.*

*The results of this research show that the regulations regarding the prohibition of recording and taking images with sexual content as stipulated in Article 14 paragraph (1) a of the Sexual Violence Crime Law do not focus enough on the scope of prohibited content, so that in its implementation it creates gaps in multiple interpretations. For this reason, reform efforts are needed by stating the scope of prohibited content in Article 14 paragraph (1) a of the Sexual Violence Crime Law. This can be done by looking at references to existing regulations in other countries, such as by comparing regulations regarding the prohibition of recording and taking pictures with sexual content in United States law, which tends to be specific in mentioning and explaining acts that are prohibited from being recorded and photographed, the scope of prohibited content. to be recorded and photographed, places where recording and picture taking activities are prohibited and certain conditions where a person is prohibited from being the object of recording and taking pictures without consent. Even though the two countries have different social, cultural and religious backgrounds, it does not rule out the possibility of making updates to Article 14 paragraph (1) a which is more specific regarding prohibited content without imitating the content contained in the United States Constitution. For this reason, it is hoped that the Indonesian State will be able to create original regulations that can reach all diversity in society by mentioning sexually charged contexts more specifically, such as nudity and body parts that are properly covered by clothing as well as sexual activity against the will or without the consent of the object being recorded and photographed.*

**Keywords:** *Electronic Based Sexual Violence, Sexual Content, Comparative Law*